



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : TRIBUANA WETANGTERAH
2. Jabatan : KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE
MADYA PABEAN B ATAMBUA
3. NHK : 136474

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.473.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/70 m2 di KAB / KOTA KOTA KUPANG , HASIL SENDIRI Rp. 580.000.000
2. Tanah Seluas 1000 m2 di KAB / KOTA KUPANG, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA BALIKPAPAN , HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 20 m2/15 m2 di KAB / KOTA KOTA KUPANG , HASIL SENDIRI Rp. 43.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 21.000.000

1. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 21.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 259.339.422

F. HARTA LAINNYA Rp. 51.041.922

Sub Total Rp. 1.804.381.344

III. HUTANG Rp. 169.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.635.381.344

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta



kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.